

KINERJA PERDAGANGAN LINTAS BATAS NTT-TIMOR LESTEE¹

Oleh : Sukarna Wiranta²

ABSTRACT

The border trade between Belu Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia and Republic Democratic of Timor Lestee (RDTL) become the crucial issue. It is due to the border become the illegal trading of all comodities, particularly staple foods due of its high different price of those commodities. While on the other hand, they were a big families of those

people in Indonesia and Timor Lestee. The trade using the many jalan tikus (rat streets) to reach Belu which familiar to illegal trader from RDTL in order to get income. This happened after Timor Timur has separated from Indonesia. This paper aims to describe the situation of ilegal trade border between East Timor and Timor Lestee.

LATAR BELAKANG

Sejak propinsi Timor Timur (Timtim) melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk pemerintahan sendiri yaitu, Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) timbul kekhawatiran, terutama masyarakat yang tinggal di perbatasan NTT dan RDTL, terjadi konflik antar mereka. Tetapi syukur

hal ini tidak terjadi karena kedewasaan berpikir masing-masing pihak. Konflik memang terjadi tetapi hanya sebatas riak-riak atau terbatas pada elite politik saja karena perbedaan pandangan antara kedua belah pihak. Di samping itu, meskipun telah berpisah tetapi mereka umumnya masih sefamili, seagama, sebudaya, sebahasa, dan memiliki kebiasaan yang sama. Hal ini pun pernah terjadi pada

¹ Tulisan ini merupakan *summary* dari penelitian Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Timor Lestee yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2004. Tulisan ini dipresentasikan padabulan Juli 2005 tentang Masalah-masalah perbatasan NTT-Timor Lestee yang diselenggarakan Pemda Propinsi NTT di Jakarta. Banyak terima kasih kami ucapkan kepada peserta seminar atas masukannya.

² Profesor Riset bidang Sosial Ekonomi, Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, sekaligus koordinator penelitian

masyarakat perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, Papua dan daerah perbatasan lainnya. Terjadinya konflik lebih disebabkan oleh kondisi masyarakat perbatasan yang sering membandingkan kemajuan daerahnya dengan daerah tetangganya. Selain itu, dalam pengelolaan SDA akibat kekurangjelasan batas kedua negara atau kurangnya perangkat hukum dalam menyelesaikan konflik. Kurangnya informasi (*assymetric information*) di antara kedua belah pihak pun sering memunculkan konflik antar mereka.

Memang diakui bahwa masyarakat yang tinggal di perbatasan umumnya relatif miskin atau tertinggal dibandingkan dengan masyarakat kota. Demikian pula dengan masyarakat perbatasan NTT dan Timor Leste dibandingkan dengan masyarakat kota seperti Kupang, apalagi dibandingkan dengan masyarakat kota di Jawa dan Sumatera. Tingkat ketimpangannya, baik pendapatan, aset, informasi, maupun antar daerah masih tinggi. Pengungsi pun masih banyak, dan harga-harga kebutuhan pokok relatif tinggi, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Kajian yang pernah dilakukan LIPI (1996, 2003)³ terhadap masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak

menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Dayak di Sarawak lebih baik dari Dayak Indonesia. Mereka menilai bahwa pemerintah Malaysia lebih memperhatikan nasibnya dari pada pemerintah Indonesia karena mereka bisa bekerja di Malaysia dengan upah yang tinggi. Begitu pula, para pedagang Indonesia yang berniaga di Malaysia berpendapat bahwa mereka memperoleh keuntungan yang layak karena harga barang-barang dagangannya lebih mahal dibandingkan Indonesia. Belum lagi, masyarakat perbatasan lebih sering menonton TV dan mendengar radio Malaysia dari pada TV dan radio Indonesia sehingga informasi tentang Malaysia lebih banyak dikuasai dibandingkan informasi tentang negerinya sendiri. Demikian pula dengan masyarakat Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia Timur. Di lain pihak, kehidupan masyarakat perbatasan antara Sulawesi Utara dan Filipina, khususnya masyarakat kabupaten Sangir dan Talaud yang umumnya bergantung pada sektor perikanan dan hasil-hasil laut lainnya, serta bekerja di Filipina Selatan. Mereka pun sering membandingkannya dengan Filipina yang menurutnya, kehidupan masyarakat Filipina relatif lebih baik dari Indonesia. Masyarakat Papua pun demikian di mana kehidupan penduduk Papua Timur atau New Guinea dinilainya lebih baik.

³Haba, J, dan Siburian, R (2003, 2006); *Studi Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Timor Leste sebagai Pengembangan Standar Hidup* (Jakarta : PMB-LIPI)

Dalam kaitan ini, Kabupaten Belu, Propinsi NTT dipilih dalam penelitian ini karena berbatasan langsung dengan Timor Leste yang tadinya merupakan bagian dari NKRI sehingga perlu untuk diketahui kondisinya sekarang, apakah lebih baik atau lebih buruk sebelum dan sesudah memisahkan diri. Namun yang jelas, Kab Belu masih tetap memiliki struktur ekonomi yang relatif sama dengan kabupaten lain di Indonesia yaitu masih tergantung pada sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan) akibat produk brutonya paling tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Sektor ini bisa diberdayakan melalui peningkatan produktivitas. Sementara sektor perdagangan di urutan berikutnya di mana barang-barang yang diperdagangkan umumnya barang-barang kebutuhan pokok yang diperoleh dari Kupang atau didatangkan dari Jawa, dan bisa dipasarkan di daerah perbatasan Belu dan Timor Leste. Program pengembangan koperasi dan usaha kecil pun bisa diberdayakan, namun program ini tampaknya sulit dilaksanakan karena daya beli masyarakat NTT masih rendah.

Secara umum, perdagangan lintas batas antara NTT dan Timor Leste menunjukkan bahwa berpisahnya Timor Timur dari NKRI yang menjadi negeri sendiri (RDTL) memunculkan berbagai masalah di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lainnya yang mengakibatkan hal-hal berikut :

- Belum tertatanya secara jelas batas wilayah teritorial antara NKRI dan RDTL berimplikasi terhadap kepastian hukum di wilayah masing-masing negara.
- Masih maraknya perdagangan ilegal lintas batas antar kedua negara akibat oleh masalah ekonomi, sosial, politik dan lainnya.
- Keberadaan institusi pemerintah pusat (TNI/POLRI, Keimigrasian dan Pabean) di kabupaten Belu telah mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu di dalam mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri. Alasannya, karena di luar aspek pertahanan/keamanan, hubungan luar negeri, fiskal/moneter, agama dan yustisi, seluruh kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah (UU No 32/2004),
- Masih besarnya jumlah pengungsi ilegal (mencapai sekitar 100.000 orang) dari RDTL ke kabupaten Belu semakin menambah persoalan Pemda Kab Belu dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran di wilayahnya.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ke-

miskinan dan pengangguran, telah dilakukan usaha pemberdayaan masyarakat. Namun usaha yang dilakukan ini belum berjalan secara optimal akibat berbagai faktor. Atas dasar ini, diperlukan integrasi program, baik secara internal maupun eksternal agar tercapai sinergi dan menghasilkan output atau produktivitas yang tinggi.

Tujuan Penelitian

- Mengidentifikasi struktur perekonomian daerah kabupaten Belu
- Mengkaji kinerja perdagangan lintas batas kabupaten Belu-Timor Leste atau RI-Timor Leste
- Mengetahui langkah-langkah Pemerintah Daerah kabupaten Belu dalam upaya meningkatkan perdagangan lintas batas Belu-Timor Leste.

Metodologi

Metode untuk memilih lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu daerah perbatasan atau daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain serta memperoleh dampak dari perbatasan itu, baik positif maupun negatif. Sementara pendekatan yang digunakan berupa *top-down* dan *bottom-up approach*. Pendekatan pertama dilakukan melalui pengamatan yang diperoleh dari para pengambil keputusan dalam penyelenggara pemerintahan. Mereka terdiri dari para perencana, pengambil kebijakan dan lainnya. Sementara pendekatan kedua dilakukan

melalui upaya menangkap aspirasi yang muncul di masyarakat, khususnya para pelaku usaha di kabupaten Belu.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi yaitu penggambaran secara deskriptif tentang objek yang diteliti. Analisis deskriptif ini juga menggunakan tabel, grafik, dan lainnya yang bersifat menjelaskan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kabupaten Belu, khususnya daerah perbatasan antara Belu dan Timor Leste. Sebabnya, daerah ini berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kabupaten ini menampung sekitar 100.000 orang migran dari Timor Leste.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Haba dan Siburian (2003), di Desa Kobalima dan Desa Litamali sebagai berikut :

- Pedagang umumnya berjualan di pasar tradisional yang bersifat *minggon* di mana aktivitasnya berlangsung dari jam 7.00 hingga jam 10.00 pagi,
- Pedagang lokal menjual hasil pertanian seperti tomat, cabe, sayuran, pisang, jeruk ayam, ikan, dan lainnya
- Pedagang keliling umumnya etnis Bugis yang menjual

pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan untuk mandi dan cuci, alat tulis dan lainnya di mana mereka berasal dari luar desa,

- Konsumen tidak hanya penduduk desa setempat, tetapi juga banyak yang berasal dari desa tetangganya,
- Perdagangan *illegal* sering terjadi antara pengusaha atau pedagang yang bermukim di desa Kobalima dengan pengusaha/pedagang dari RDLT.

Dalam upaya menghindari perdagangan ilegal tersebut, kedua pemerintahan telah membangun pasar di dusun Motomase, wilayah RI oleh camat Kobalima, dan kepala distrik Kobalima wilayah RDTL. Pasar dibuka pada hari Kamis dari jam 7.00 hingga 16.00 dan komoditas yang diperdagangkan adalah peralatan rumah tangga, pakaian, beras, dan BBM yang disubsidi, dan kebutuhan pokok lainnya. Di pasar ini, konsumen umumnya penduduk RDTL karena harga barang-barang di wilayah RI relatif lebih murah dibandingkan dengan pasar di RDTL. Penduduk RDTL yang berbelanja di perbatasan Indonesia dibatasi sampai US\$ 500 di mana untuk pengawasannya dilakukan petugas Bea dan Cukai di perbatasan yang jumlahnya maksimum US\$ 500,-, dan jika lebih, maka pihak Bea dan Cukai RI akan mengenakan pajak. Namun pasar ini hanya berjalan 1 tahun

akibat perubahan kebijakan pemerintahan RDTL yang mengganti visa (kartu masuk) dengan paspor dengan alasan,

- Keberadaan pasar menyebabkan penduduk RDTL enggan berbelanja di pasarnya sehingga berimplikasi kepada devisa yang mengalir ke Indonesia,
- Banyak terjadi penyelewengan dengan alasan untuk kegiatan pertemuan keluarga (RDTL dan Indonesia).

Akibat ditutupnya pasar Motomase menyebabkan kegiatan penyelundupan meningkat pesat sehingga pasar Motomase dibuka kembali, namun pasar sekarang tidak seramai dahulu lagi. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji kembali perdagangan lintas batas di perbatasan Belu dan Timor Leste. Untuk itu, diperlukan telaahan yang lebih komprehensif yang mencakup bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, keamanan dan lainnya agar mereka leluasa dalam melakukan akitifitasnya itu.

Profil Kab Belu.

Kabupaten Belu mempunyai luas area sekitar 2.447 Km² (244.577 Ha) atau 5,2% dari luas wilayah provinsi NTT. Kabupaten Belu berbatasan dengan RDTL, dan terletak antara 1240-1260 LS, dan sekarang menjadi pintu gerbang untuk masuk RDTL lewat darat. Di utara, Kabupaten Belu berbatasan dengan Selat

Ombay, di sebelah timur dengan Laut Timor, di selatan dengan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS). Kabupaten Belu terbagi dalam 12 kecamatan, dengan kecamatan terluas Malaka Timur. Ibukota kabupaten berada di kecamatan Atambua Kota.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, jumlah penduduk di kabupaten Belu mencapai hampir 35 juta orang atau sekitar 73 ribu rumah tangga, dengan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang yakni 172 juta laki-laki dan 173

juta perempuan. Persebaran penduduk di kabupaten Belu tidak merata, dengan kepadatan antara 77 jiwa/Km² (kecamatan Kakuluk Mesak) hingga 1.144 jiwa/Km² (kecamatan Kota Atambua). Kecamatan Rinhat memiliki populasi penduduk paling sedikit (13.380 jiwa atau 3,9%) sedangkan penduduk paling banyak berada di kecamatan Kota Atambua (64.277 jiwa atau 18,7% dari keseluruhan) disusul kecamatan Malaka Barat (55.179 jiwa atau 16,1%). Hanya terdapat 5 orang WNA yang berada di kecamatan Tasifeto Barat dan 92 orang WNA Cina yang berada di ibukota kabupaten. Lihat tabel 1.

Tabel 1. : Jumlah Penduduk dan Luas Kecamatan di Kabupaten Belu , 2004

| No | Kecamatan | Penduduk (Jiwa) | Luas (Km ²) | Kepadatan (Jiwa/Km ²) |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Malaka Barat | 55.179 | 273 | 201 |
| 2 | Rinhat | 13.380 | 152 | 88 |
| 3 | Malaka Tengah | 32.925 | 169 | 195 |
| 4 | Sasita Mean | 20.678 | 172 | 120 |
| 5 | Malaka Timur | 36.440 | 357 | 102 |
| 6 | Kobalima | 21.928 | 217 | 101 |
| 7 | Tasifeto Barat | 25.657 | 284 | 90 |
| 8 | Kakuluk Mesak | 14.457 | 187 | 77 |
| 9 | Tasifeto Timur | 25.880 | 276 | 94 |
| 10 | Raihat | 14.050 | 871 | 161 |
| 11 | Lamaknen | 18.926 | 214 | 88 |
| 12 | Kota Atambua | 64.277 | 56 | 1.144 |
| Kabupaten Belu | | 343.777 | 2.446 | 141 |

Sumber: Kabupaten Belu Dalam Angka, BPS, 2004

Struktur Ekonomi Kabupaten Belu

Sementara itu, struktur ekonomi, kabupaten Belu sangat tergantung dari sektor pertanian diikuti oleh sektor industri, dan sektor perdagangan. Lihat tabel 2.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sektor yang cukup dominan di kabupaten Belu adalah sektor pertanian yang mencapai hampir 40%. Kemudian sektor jasa-jasa yang mencapai lebih dari 20%, disusul oleh sektor perdagangan (termasuk restoran dan hotel) dengan kontribusi sekitar 15%. Selama ini, terjadi tren penurunan distribusi PDRB pada sektor-sektor utama tersebut di mana pada tahun 2000 pengaruh sektor pertanian masih dominan, yaitu di atas 40% pada tahun 2000, namun turun menjadi 36% pada tahun 2003, dan terjadi tren penurunan pada

tahun-tahun selanjutnya. Penurunan sektor pertanian diikuti oleh kenaikan sektor jasa-jasa yakni dari 18,3% menjadi lebih dari 23% pada periode yang sama. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor lainnya, meskipun mengalami perubahan, namun relatif stabil.

Sebagian besar kontribusi sektor pertanian disumbang oleh sub sektor tanaman pangan meski mengalami penurunan dari sekitar 40% menjadi 36,2%, sedangkan *share* terbesar kedua sektor pertanian adalah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya yang menyumbang sekitar ? atau lebih dari 30%. Sub sektor yang paling rendah kontribusinya adalah sub sektor kehutanan, yakni sekitar ½ persen saja. Kondisi ini tampaknya tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya sehingga

Tabel 2 : Struktur Ekonomi Kabupaten Belu atas Dasar Harga Konstan, 2000-2003

| No | Lapangan Usaha | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|
| 1 | Pertanian | 40,2 | 39,3 | 37,9 | 36,2 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1,1 | 1,0, | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,61 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Bangunan | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| 6 | Perdagangan, Restoran dan Hotel | 15,7 | 15,1 | 15,0 | 14,8 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 12,3 | 12,0 | 12,4 | 12,8 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| 9 | Jasa-jasa | 18,3 | 20,2 | 21,6 | 23,4 |

Sumber: Kabupaten Belu Dalam Angka, BPS, 2004

kenyataan ini mengindikasikan bahwa potensi pertanian kabupaten Belu terletak pada kedua sub sektor, yakni sub-sektor tanaman pangan dan peternakan serta hasil-hasilnya. Sementara di sektor perdagangan, restoran dan hotel, dominasi terbesar oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan *share* lebih dari 95%. Sebaliknya, *share* sub sektor restoran dan perhotelan sangat kecil masing-masing hanya 4,8% dan 0,2% saja di mana kondisi ini tidak mengalami pergeseran berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya aktivitas sub sektor restoran dan hotel bisa diartikan

bahwa sektor pariwisata di kabupaten Belu belum berkembang dengan baik..

Di sektor jasa-jasa, peran pemerintah masih sangat besar, yang ditunjukkan oleh kontribusi sub sektor jasa-jasa pemerintah yang mencapai lebih dari 92%, sedangkan kontribusi pihak swasta kurang dari 8%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya peran swasta dalam aktivitas perekonomian daerah sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil kebijakan yang dapat menarik pihak swasta untuk ikut serta membangun kabupaten Belu. Lihat tabel 3.

Tabel 3 : Kontribusi Sektor Pertanian, Perdagangan dan Jasa-jasa , 2000-2003

| No | Lapangan Usaha | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|
| 01 | Pertanian | | | | |
| | Tanaman bahan makanan | 56,5 | 56,1 | 55,9 | 55,6 |
| | Tanaman perkebunan | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 6,4 |
| | Peternakan dan hasil-hasilnya | 34,1 | 33,6 | 33,3 | 32,8 |
| | Kehutanan | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | Perikanan | 4,8 | 4,6 | 4,8 | |
| 02 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | | | | |
| | Perdagangan besar dan eceran | 95,6 | 97,5 | 96,5 | 96,0 |
| | Restoran dan rumah makan | 4,1 | 2,3 | 3,3 | 3,8 |
| | Perhotelan | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 03 | Jasa-jasa | | | | |
| | Pemerintahan umum | 93,5 | 92,3 | 92,4 | 92,5 |
| | Swasta | 6,5 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka, 2004

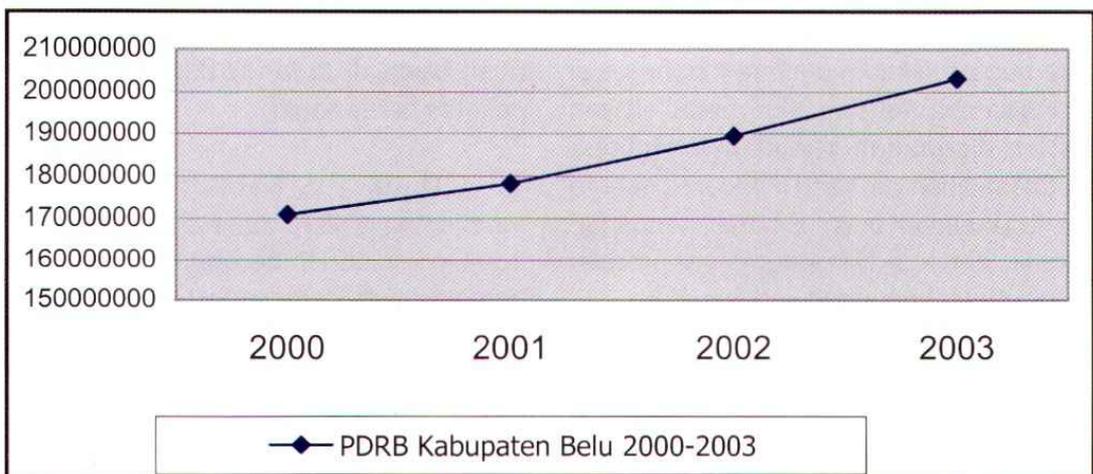
Secara keseluruhan, PDRB kabupaten Belu selama periode 2000-2003 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2000 hanya berjumlah Rp 170 miliar, maka pada tahun 2003 naik hampir 20%, yaitu menjadi lebih dari Rp 202 miliar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu yang dicerminkan oleh pertumbuhan PDRB ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah ini, melainkan juga menjadi indikator kemampuan daerah untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya, baik SDA, SDM, maupun sumber daya lainnya.

Laju pertumbuhan riil perekonomian kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 4 di mana laju pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh laju pertumbuhan sektor-sektor dalam pembentukan PDRB.

Dari tabel 4 tersebut terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu mengalami kenaikan yang cukup berarti setiap tahunnya. Pada tahun 2001 hanya tumbuh 4,3%, kemudian naik menjadi 6,3% pada tahun 2002 dan naik lagi menjadi 7,2% pada tahun 2003 (lihat grafik 1).

Namun demikian, masih ada sektor yang memiliki pertumbuhan negatif, yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan pada tahun 2001 dan 2002. Akan tetapi pada tahun 2003, semua sektor memperlihatkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yang mencapai lebih dari 16,0%. Sebaliknya, meskipun sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan positif, tetapi hanya tumbuh 0,2% saja (lihat tabel 4).

Grafik 1.
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Belu, 2000-2003



Tabel 4 : Laju Pertumbuhan PDRB Kab Belu Atas Dasar Harga Konstan, 2001-2003 (persen)

| No | Lapangan Usaha | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 1 | Pertanian | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | -5,7 | 0,6 | 1,8 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4,0 | 4,5 | 5,2 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | -0,1 | -0,4 | 0,2 |
| 5 | Bangunan | -6,1 | 1,2 | 2,3 |
| 6 | Perdagangan, Restoran dan Hotel | 0,6 | 5,8 | 5,6 |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi | 2,0 | 10,1 | 9,9 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa | 13,8 | 8,1 | 8,8 |
| 9 | Jasa-jasa | 15,2 | 13,4 | 16,1 |
| Jumlah PDRB | | 4,3 | 6,3 | 7,2 |

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka, 2004

Kondisi Perdagangan Lintas Batas NTT-Timor Lestee

Belum tuntasnya penentuan garis batas kedua negara dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan dua negara. Hal ini dialami Indonesia di mana sampai Agustus 2005, batas wilayah belum disepakati kedua belah pihak. Permasalahan lain yang dihadapi 2 negara adalah masalah pelintas batas, pencurian ternak, dan kondisi geografi yang dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan adalah belum jelasnya batas wilayah (alam dan/

atau tonggak-tonggak pembatas), terjadinya penyelundupan barang akibat perbedaan harga yang cukup mencolok (BBM, gula, dan beras), adanya kerawanan sosial, adanya tindak kriminal (pencurian sepeda motor, ternak peliharaan dan hasil bumi di ladang) dan banyaknya pelintas batas ilegal.

Untuk itu, batas negara yang memisahkan NKRI dan RDTL sepanjang 230 km kini sudah berubah karena telah bergeser jauh. Pergeseran batas ini sangat merugikan RI karena pilar atau patok yang menjadi pembatas bergeser dan menjorok jauh ke dalam wilayah RI. Salah satu batas alam adalah Sungai Malibaka yang

membelah alur daratan antara kedua negara. Rakyat yang berada di sepanjang wilayah tapal batas, bila hari pasar tiba, mereka berdagang bersama secara tradisional sebagaimana sudah dilakukan leluhurnya sejak dahulu. Paling tidak mereka memperlihatkan kartu pelintas batas. Yang lebih fatal adalah perdagangan di wilayah perbatasan cenderung ilegal yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat kabupaten Belu. Upaya penyelundupan sejumlah bahan kebutuhan pokok (minyak tanah, solar, bensin) merembes ke wilayah Timor Leste masih tetap berlangsung. Karena upaya ilegal itu dilakukan lewat hutan, jalan setapak maupun lokasi-lokasi tersembunyi di sepanjang tapal batas antar dua negara sulit dipantau dan ditindak tuntas. Belum lagi yang merembes lewat pasar tradisional yang kini sudah digelar di tiga lokasi, banyak kebutuhan rakyat seperti BBM, gula maupun beras, diselundupkan tanpa bisa dipantau dengan baik oleh petugas. Namun sejak diberlakukannya ketentuan pembayaran fiskal setiap keluar masuk wilayah negara, kegiatan perdagangan di tiga pasar perbatasan yang dahulunya marak, sekarang sepi, namun penyelundupan tetap marak sampai sekarang.

Demi terciptanya stabilitas keamanan sepanjang perbatasan RI-RDTL, rakyat di Kab Belu mendesak supaya pemerintah segera melakukan pemetaan ulang wilayah perbatasan. Alasannya, untuk menekan kerawanan sosial (konflik) penduduk sepanjang perbatasan yang kini semakin meningkat. Pemda Kabupaten

Belu sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar dapat menempatkan tenaga konsul RI di perbatasan demi mempermudah koordinasi dengan RDTL seandainya terjadi hal-hal yang menyangkut masalah perbatasan. Masalahnya, sejak tahun 1999, kondisi kabupaten Belu cukup gawat akibat banyaknya pengungsi masuk dengan karakter dan perilaku buruk seperti pesta mabuk-mabukan. Begitu pula, jika penduduk Belu mengadakan pesta walaupun tidak diundang, banyak penduduk RDTL datang dengan pakaian sekedarnya (tidak sopan) yang sering membuat onar.

Dalam hubungan ini, guna mengatasi masa transisi paska jajak pendapat di mana masih terjadi hilir mudik pengungsi keluar-masuk kabupaten Belu, baik secara sengaja untuk berdagang atau untuk menyelamatkan diri, maka dibangun 3 pasar di perbatasan (Montain, Turisan, Metamau) yang bisa menjadi tempat bertemunya para pedagang dari dua wilayah perbatasan untuk saling bertransaksi dan bertukar barang. Pasar dan sarana prasarana yang dibangun telah dapat menormalisasi kondisi perbatasan yang sebelumnya diwarnai oleh perdagangan ilegal lintas batas melalui jalan tikus.

Dengan demikian, pembangunan pasar dan sarana prasarana pendukungnya adalah bertujuan untuk mengeliminir perdagangan ilegal tersebut, guna meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten Belu. Perbedaan harga yang

mencolok yang mendorong masyarakat kabupaten Belu menjual barangnya ke RDTL. Sebagai misal, minyak tanah di kabupaten Belu seharga Rp 1.000/liter (kini Rp 6.000/liter), namun harga di kota Dilli bisa mencapai Rp 5.000 (kini Rp 15.000/liter). Demikian juga barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun sayang, operasionalisasi pasar ini hanya berjalan beberapa minggu saja akibat adanya berbagai kejadian dan kebijakan yang menghambat kegiatan perdagangan. Sekarang, pasar-pasar tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada penjual dan pembeli yang datang.

Di lain pihak, dengan adanya pelabuhan Atapupu merupakan kesempatan bagi kabupaten Belu sebagai tempat masuknya barang ke RDTL. Tetapi, barang-barang dari Indonesia banyak yang langsung dikirim dari Surabaya ke Dili, meski ada juga barang yang seharusnya bertujuan ke pelabuhan Atapupu, akan tetapi tidak dibongkar di pelabuhan itu, tetapi langsung dibawa ke RDTL karena kapalnya hanya singgah untuk menekan biaya perdagangan sebab masuk kategori perdagangan antar pulau bukan ekspor. Barang Keluar

Menurut data Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Atapupu, kabupaten Belu menunjukkan bahwa jenis komoditas yang keluar dari kabupaten Belu pada tahun 2003 telah mencapai 18 item yang antara lain adalah kacang hijau, asam isi, sam biji, sapi potong, kerbau potong, kulit sapi, kopi biji, kemiri kulit, kemiri isi, biji mete,

kopra, biji kapok, kayu bangunan, kayu kuning, kacang tanah, madu lebah, biji kakao dan daun pintu kayu. Gambaran komoditas yang diperdagangkan keluar kabupaten Belu pada intinya adalah komoditas hasil pertanian yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub-sektor sebagai berikut :

- Bahan makanan, kelompok palawija,
- Perkebunan, khususnya tanaman tradisional
- Peternakan, khususnya jenis kelompok ternak besar, dan
- Kehutanan, khususnya kayu olahan.

Dengan memperhatikan kenyataan di atas, tentu dapat digambarkan bahwa produk-produk yang diperdagangkan keluar kabupaten Belu masih belum dalam bentuk barang hasil olahan. Hal ini tentu dapat diinterpretasikan bahwa sektor industri pengolahan, walaupun pun ada, belum mampu bersaing dengan hasil industri daerah lain. Jadi, produk industri yang dihasilkan itu relatif biayanya masih lebih mahal bila dibandingkan dengan wilayah lain. Tabel 5 di bawah ini memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2002-2003 terdapat kenaikan secara umum komoditas yang diperdagangkan ke luar, terutama adalah komoditas sub-sektor peternakan dan sub-sektor perkebunan.

Tabel 5 : Perkembangan Barang Keluar dari Kabupaten Belu, 2002-2003

| No | Jenis Komoditas | Satuan | Jumlah | |
|----|-----------------|----------------|--------|--------|
| | | | 2002 | 2003 |
| 1 | Kacang Hijau | Ton | 340 | 209 |
| 2 | Asam Isi | Ton | 4.532 | 1.469 |
| 3 | Asam Biji | Ton | 1.910 | 2.419 |
| 4 | Sapi Potong | Ekor | 8,914 | 10.230 |
| 5 | Kerbau Potong | Ekor | 162 | 197 |
| 6 | Kulit Sapi | Ton | 192 | 107 |
| 7 | Kopi Biji | Ton | 1.653 | 751 |
| 8 | Kemiri Isi | Ton | 1.261 | 422 |
| 9 | Kemiri Kulit | Ton | 43 | 113 |
| 10 | Biji Mete | Ton | 396 | 406 |
| 11 | Kopra | Ton | 1.01 | 1.177 |
| 12 | Biji Kapok | Ton | 427 | 52 |
| 13 | Kayu Bangunan | M ³ | 1.314 | 327 |
| 14 | Kayu Kuning | M ³ | 1.056 | 5 |
| 15 | Kacang Tanah | Ton | 34 | 274 |
| 16 | Madu Lebah | Ton | 2 | 23 |
| 17 | Biji Kakao | Ton | - | 1 |
| 18 | Daun Pintu Kayu | M ³ | - | 16 |

Sumber : Laporan Komoditi Impor Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Atapupu.

Hasil peternakan tersebut umumnya diperdagangkan ke pulau Jawa melalui pelabuhan Atapupu, baik daging maupun kulit. Meningkatnya perdagangan daging dan kulit ternak itu diduga karena kebutuhan di pulau Jawa sudah tidak mampu dipasok sepenuhnya dari provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi Bali

selama ini. Bahkan kebutuhan daging di pulau Jawa yang semakin meningkat ini, kini lebih banyak dipasok dari luar negeri. Tentu, kenyataan ini menjadi peluang besar bagi para peternak di kabupaten Belu untuk mengembangkan sub-sektor peternakan dalam rangka meningkatkan perdagangan keluar hasil-hasil ternaknya.

Namun sebaliknya, seperti yang digambarkan pada Tabel 3 di atas, telah terjadi penurunan komoditas sub-sektor bahan makanan dengan sub-sektor kehutanan, kecuali komoditas non-kayunya, yakni lebah madu. Penurunan perdagangan keluar, khususnya, untuk jenis kayu bangunan dan kayu kuning, justru diikuti oleh munculnya komoditas daun pintu kayu di tahun 2003.

Perdagangan sub-sektor kehutanan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perdagangan keluar kabupaten Belu sudah tidak lagi didominasi oleh komoditas kayu gelondongan, akan tetapi kayu yang diperdagangkan keluar kabupaten telah diolah terlebih dahulu dalam bentuk daun pintu kayu, walaupun jumlahnya masih relatif kecil. Jelasnya, kebijakan pengusaha maupun Pemda Kabupaten Belu untuk mengolah terlebih dahulu kayu-kayu yang dihasilkan kabupaten Belu sebelum diperdagangkan keluar merupakan kebijakan yang sangat baik. Alasannya, dengan usaha mengolah sebelum diperdagangkan keluar kabupaten akan memberikan manfaat berikut :

- Memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah kabupaten Belu,
- Menyerap banyak tenaga kerja pada industri pengolahan kayu, dan
- Memberikan/meningkatkan pendapatan masyarakat

Barang Masuk

Barang barang yang masuk di dalam perdagangan di pelabuhan Atapupu, menurut catatan Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Atapupu kabupaten Belu, mencapai 33 komoditas di tahun 2002 dan 2003. Namun umumnya adalah komoditas hasil pengolahan industri, dalam bentuk minyak maupun bukan minyak.

Komoditas hasil pengolahan industri dalam bentuk hasil pertambangan antara lain adalah solar, premium, minyak tanah dan aspal. Sementara hasil industri pengolahan bukan minyak antara lain adalah tepung terigu, gula pasir, tekstil, sabun, minyak goreng, benang tenun, seng atap, semen, tripleks, ban mobil/sepeda motor, kain batik, kain biasa, paku seng, mentega, susu bubuk, sepeda motor, mobil dan tepung kanji. Sementara yang dikelompokkan ke dalam hasil produk pertanian dan pertambangan antara lain adalah beras, jagung pipilan, ikan kering, telur ayam, garam beryodium dan pinang iris kering serta aspal.

Umumnya, barang-barang yang masuk ke kabupaten Belu melalui pelabuhan Atapupu itu berasal dari provinsi Jawa Timur dan provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan pelabuhan Atapupu yang bisa dihubungi melalui lautan dari provinsi Jawa Timur maupun provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini bisa diperlihatkan dengan jenis komoditas misalnya, semen di mana semen Gresik yang berasal dari provinsi

Jawa Timur, dan Semen Tonasa/Bosawa yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Sementara semen Kupang yang diproduksi di provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di kabupaten Kupang. Di lain sisi, kebutuhan sembako tampaknya masih dipasok dari luar kabupaten Belu. Seperti terlihat pada Tabel 3.2. bahwa kebutuhan beras, tepung terigu, gula pasir, tekstil, minyak goreng telur ayam, sabun, garam mentega maupun ikan asin kering masih dipasok melalui pelabuhan Atapupu.

Hal di atas dapat diinterpretasikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, masyarakat kabupaten Belu masih belum mampu memenuhinya sendiri. Kalau memang seperti itu keadaannya, tentunya peluang untuk mengembangkan kegiatan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih relatif besar dapat dilakukan di kabupaten Belu ini. Namun jika diperhatikan bahwa dalam kurun 2002-2003 yang mengalami kenaikan cukup signifikan nampaknya adalah kebutuhan dasar masyarakat kabupaten Belu, seperti sabun, minyak tanah dan garam beryodium. Komoditas tersebut tentunya merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat.

Di lain pihak, nampaknya dalam kurun waktu tersebut juga terlihat bahwa kenaikan jumlah komoditas besi beton ke kabupaten Belu yang melalui pelabuhan Atapupu meningkat mencapai lebih dari 25 kali lipat dan semen yang masuk dari Kupang, Surabaya maupun Makassar nampaknya menunjukkan besarnya

permintaan untuk pembangunan fisik di kabupaten Belu dan sekitarnya.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa pembangunan di kabupaten Belu cenderung meningkat setiap tahunnya, walau masih dalam indikasi masuknya barang-barang hasil industri pengolahan dari luar kabupaten ke kabupaten Belu. Apalagi dengan masuknya ban mobil maupun sepeda motor yang relatif banyak di tahun 2003, tentu dapat diinterpretasikan sebagai besarnya permintaan masyarakat terhadap pengganti roda kendaraan penduduk di kabupaten Belu, tentunya.

Sementara hubungan dagang antara NTT dan Timor Timur sudah terjalin lama sehingga yang diperlukan sekarang adalah pengaturan perdagangan lintas batas yang lebih baik agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Perdagangan antar 2 negara selalu terjadi karena alasan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Dalam kaitan ini, perdagangan lintas batas Belu-RDTL adalah sebagai berikut :

- Barang yang diimpor dari RDTL antara lain kopra, kopi, kemiri dan beras,
- Barang yang diekspor ke RDTL antara lain adalah BBM (solar, minyak tanah dan premium), makanan dan minuman, bahan bangunan, meubelair, barang campuran, elektronik/mesin dan mainan anak-anak.

Tabel 6 : Perkembangan Barang Masuk ke Kabupaten Belu, 2002-2003

| No | Jenis Komoditas | Satuan | Jumlah | |
|----|--------------------|------------|---------|--------|
| | | | 2002 | 2003 |
| 1 | Beras | Ton | 17.185 | 11.628 |
| 2 | Tepung Terigu | Ton | 1.668 | 1.041 |
| 3 | Gula Pasir | Ton | 2.999 | 1.691 |
| 4 | Tekstil | Ekor | 28.000 | 19.000 |
| 5 | Sabun | Ekor | 289 | 553 |
| 6 | Minyak Goreng | Ton | 290 | 180 |
| 7 | Benang Tenun | Ton | 29 | 24 |
| 8 | Besi Beton | Ton | 492 | 12.127 |
| 9 | Seng Atap | Lembar | 132.950 | 87.150 |
| 10 | Semen Kupang | Ton | 1.500 | 3.350 |
| 11 | Semen Gresik | Ton | 8.215 | 200 |
| 12 | Semen Tonasa | Ton | 8.315 | 3.688 |
| 13 | Semen Bosowa | Ton | 2.000 | 3.750 |
| 14 | Tripleks | Lembar | 77.000 | 4.200 |
| 15 | Premium | Kilo Liter | 17.389 | 13.636 |
| 16 | Solar | Kilo Liter | 24.339 | 24.996 |
| 17 | Minyak Tanah | Kilo Liter | 13.938 | 18.802 |
| 18 | Ban Mobil | Buah | - | 6.169 |
| 19 | Ban Sepeda Motor | Buah | - | 1.850 |
| 20 | Kain Batik | Lembar | 16.000 | 15.000 |
| 21 | Paku Biasa | Ton | 27.500 | 6.267 |
| 22 | Paku Seng | Ton | 42 | 7.431 |
| 23 | Jagung Pipilan | Ton | 50 | 11 |
| 24 | Garam Beryodium | Ton | 373 | 4.036 |
| 25 | Telur ayam | Ton | 87 | 48 |
| 26 | Mentega | Ton | 144 | 50 |
| 27 | Susu Bubuk/Cair | Ton | 285 | 76 |
| 28 | Sepeda Motor | Unit | 660 | 240 |
| 29 | Mobil | Unit | 14 | 31 |
| 30 | Aspal | Ton | 756 | 420 |
| 31 | Ikan Kering | Ton | 4.260 | - |
| 32 | Pinang Iris Kering | Ton | 33 | 19 |
| 33 | Tepung Kanji | Ton | 4 | 17 |

Sumber : Laporan Komoditi Impor Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Atapupu.

Dalam kaitannya dengan lalu lintas perdagangan antara kabupaten Belu dengan RDTL, terdapat pos perbatasan RI-RDTL yang berada di 3 (tiga) lokasi, yakni antara lain adalah : ① Montain, ② Salore, dan ③ Silawan

Pos Montain terletak 30 km dari Atambua, kabupaten Belu, merupakan pos terdepan berbatasan dengan Timor Leste (RDTL). Pos ini dilalui kendaraan yang membawa barang maupun penumpang, dari dan menuju RDTL. Pos Salore lebih banyak terjadi kegiatan kriminal yang sering terjadi di perbatasan seperti : ① pencurian ternak, ② pelintas batas ilegal, dan ③ penyelundupan BBM seperti solar dan minyak tanah ke RDTL di mana frekuensinya dalam seminggu bisa mencapai 3 kali. Sedangkan Pos Silawan kurang lebih sama dengan pos Salore yaitu sering terjadi tindak kriminal ① pencurian ternak, ② perladangan ilegal, ③ pelintas batas, dan ④ penyelundupan BBM ke Timor Leste.

Barang Ekspor

Untuk barang-barang yang diekspor ke RDTL dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan Tipe C Atapupu pada bulan Mei 2005 mencapai lebih dari ½ juta koli dengan nilai sekitar US\$ 280 ribu. Jika kurs US\$ 1=Rp 9.500, maka nilai transaksi ekspor kabupaten Belu ke RDTL pada bulan Mei 2005 mencapai Rp.2,65 miliar. Jika diasumsikan ekspor dari kabupaten Belu setiap bulan relatif stabil, maka ekspor setiap tahun mencapai US 3,36 juta, atau sekitar Rp. 31,9 miliar. Tentunya transaksi ekspor tersebut cukup besar untuk sebuah kabupaten yang dikategorikan miskin dan tertinggal.

Dari total ekspor komoditas ke RDTL tersebut, proporsi minyak solar mencapai hampir 100 ribu koli senilai US\$ 34.675 pada bulan Mei 2005. Kemudian barang-barang makanan dan minuman mencapai US\$ 186 ribu atau sekitar 2/3 nilai ekspor ke RDTL. Lihat Tabel 5 berikut,

Tabel 5 : Ekspor Barang di Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu, Mei 2005

| No | Jenis Komoditas | Unit | Nilai (Koli) | Tujuan (US\$) |
|----|----------------------------|---------|--------------|---------------|
| 1 | Solar | 98.570 | 34.673 | RDTL |
| 2 | Makanan dan Minuman | 268.626 | 186.340 | RDTL |
| 3 | Bahan Bangunan dan Lainnya | 190.023 | 58.244 | RDTL |
| | Total | 557.219 | 279.257 | RDTL |

Sumber : Laporan Komoditi Impor Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Atapupu

Umumnya produk-produk yang diekspor ke RDTL di luar solar dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni (i) barang makanan dan minuman serta (ii) bahan bangunan dan lainnya.

Kelompok barang makanan dan minuman antara lain adalah mie instant, roti, bir, air mineral, jamu, obat-obatan, teh kotak/botol dan sebagainya. Sementara kelompok bahan bangunan dan lainnya adalah semen, kaso, seng, paralon, paku, kawat, komputer, kertas, kasur, peralatan dapur (rumah tangga), pupuk dan lainnya. Terbukti bahwa nilai barang keluar lebih kecil dari nilai barang yang masuk. Hal ini disebabkan oleh adanya perdagangan ilegal. Terlihat bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang diekspor ke RDTL hanya solar sehingga impor utama RDTL adalah solar, premium dan minyak tanah.

Dalam kaitannya dengan ekspor minyak tanah yang dilakukan secara ilegal akibat alasan-alasan berikut :

- Perbedaan harga yang mencolok. Harga minyak tanah perliternya di Atambua hanya sebesar Rp. 1.000,- akan tetapi di kota Dilli-RDTL mencapai Rp. 5.000,-. Tentunya perbedaan harga ini mengundang spekulasi bagi para pedagang untuk menyelundupkan minyak tanah dari Atambua atau sekitarnya, ke kota Dilli.
- Dalam kaitannya dengan

hubungan kekeluargaan, penduduk kabupaten Belu dan sekitarnya menyelundupkan minyak tanah ke RDTL untuk membantu keluarganya yang kekurangan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-harinya di Republik Demokrasi Timor Leste dengan alasan untuk keluarga..

Barang-barang Impor

Catatan dari Kantor Pelayanan Tipe C Pelabuhan Atapupu, Kantor Bea dan Cukai memperlihatkan bahwa produk-produk yang masuk dari RDTL melalui pelabuhan Atapupu pada bulan Mei 2005 adalah kopra, sapi potong dan kemiri. Selain itu terdapat impor barang-barang dari AS yang berupa *corn soy blend* dan *vegetable oil*.

Catatan tentang nilai perdagangan besar dan eceran yang terjadi di kabupaten Belu pada tahun 2003 sudah mencapai sekitar Rp. 100 miliar, atau sekitar 18% dari total produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten Belu (Badan Pusat Statistik NTT, 2005). Sementara itu, impor kabupaten Belu pada bulan Mei 2005 yang masuk melalui pelabuhan Atapupu mencapai US\$ 568.517 atau setara Rp 5,4 miliar. Lihat tabel 6.

Bila dibandingkan dengan total transaksi perdagangan yang terjadi di kabupaten Belu, maka peran impor barang dari pelabuhan Atapupu itu relatif cukup besar. Bisa dibayangkan seandainya nilai

Tabel 6 : Perkembangan Barang Keluar dari Kabupaten Belu, 2002-2003

| No | Jenis Komoditas | Satuan | Jumlah | |
|----|-----------------|----------------|--------|--------|
| | | | 2002 | 2003 |
| 1 | Kacang Hijau | Ton | 340 | 209 |
| 2 | Asam Isi | Ton | 4.532 | 1.469 |
| 3 | Asam Biji | Ton | 1.910 | 2.419 |
| 4 | Sapi Potong | Ekor | 8,914 | 10.230 |
| 5 | Kerbau Potong | Ekor | 162 | 197 |
| 6 | Kulit Sapi | Ton | 192 | 107 |
| 7 | Kopi Biji | Ton | 1.653 | 751 |
| 8 | Kemiri Isi | Ton | 1.261 | 422 |
| 9 | Kemiri Kulit | Ton | 43 | 113 |
| 10 | Biji Mete | Ton | 396 | 406 |
| 11 | Kopra | Ton | 1.01 | 1.177 |
| 12 | Biji Kapok | Ton | 427 | 52 |
| 13 | Kayu Bangunan | M ³ | 1.314 | 327 |
| 14 | Kayu Kuning | M ³ | 1.056 | 5 |
| 15 | Kacang Tanah | Ton | 34 | 274 |
| 16 | Madu Lebah | Ton | 2 | 23 |
| 17 | Biji Kakao | Ton | - | 1 |
| 18 | Daun Pintu Kayu | M ³ | - | 16 |

Sumber : Laporan Komoditi Impor Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Atapupu.

yang diperoleh dari impor bulan Mei 2005 itu bisa diasumsikan stabil maka dalam setahun, nilainya mencapai Rp 65 miliar atau mencapai 65 persen dari total transaksi perdagangan kabupaten Belu pada tahun 2003.

Padahal telah ditengarai bahwa kabupaten Belu sebagai kabupaten yang

terletak di perbatasan dengan RDTL merupakan daerah terjadinya perdagangan ilegal antar negara. Impor ilegal tersebut adalah berbagai komoditas pertanian seperti kopra, kemiri, kopi, sapi dan kayu cendana. Sementara itu, komoditas yang diimpor dari RDTL di luar sektor pertanian itu antara lain uang palsu. Sulit untuk dinyatakan bahwa barang-barang,

khususnya komoditas pertanian disebut impor ilegal. Mungkin bagi pemerintah Indonesia menganggap bahwa produk-produk tersebut dinyatakan komoditas impor ilegal karena tidak tercatat di dalam transaksi perdagangan secara formal, tetapi tidak bagi masyarakat perbatasan.

Masalahnya, masyarakat yang membawa komoditas tersebut dari RDTL ke kabupaten Belu tidak melalui 3 (tiga) pos perbatasan seperti pos Motaain (30 km dari Atambua), pos Salore dan pos Silawan, akan tetapi terdapat ratusan jalan tikus yang digunakan oleh para pelintas batas untuk membawa produk-produk itu. Alasan mereka membawa produk-produk pertanian adalah :

- Sebelum terjadi disintegrasi, para pengungsi di kabupaten Belu umumnya tinggal di provinsi Timor Timur, yang kini menjadi RDTL. Mereka berkebun maupun berladang dan berternak di kampung halaman-nya itu. Akibatnya, hingga kini mereka menganggap ke RDTL untuk memanen hasil pertaniannya dan dibawa ke kabupaten Belu untuk diperdagangkan,
- Masyarakat yang mendiami kabupaten Belu itu masih dalam satu keluarga dengan masyarakat yang tinggal di RDTL. Mereka masuk ke dalam 4 (empat) etnis besar, yakni Tetum, Kemak, Bunak dan

Dawan Manlea (Pemerintah Kabupaten Belu, 2005 : i). Peristiwa 1999 telah mengundang urbanisasi bagi penduduk pedesaan di RDTL. Implikasinya bahwa ladang, perkebunan maupun peternakan mereka di pedesaan RDTL ditinggalkan. Atas dasar itu, banyak penduduk yang masih ada ikatan keluarga mengambil atau memanen hasil perkebunan di perbatasan wilayah RDTL untuk dibawa ke kabupaten Belu.

Sementara itu, maraknya impor ilegal kayu cendana sangat terkait dengan habisnya deposit kayu cendana yang ada di pulau Timor bagian barat yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Habisnya deposit kayu cendana itu terkait dengan aktivitas penebangan liar untuk diekspor ke Bali sebagai bahan pembuatan patung dan kerajinan lainnya. Deposit kayu cendana yang diselundupkan dari wilayah RDTL ke kabupaten Belu cukup marak karena nilainya sangat tinggi. Mekanisme penyelundupan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kayu cendana diambil dari hutan atau perkebunan di wilayah RDTL dan dibawa ke kabupaten Belu yang ditampung oleh para pedagang pengumpul,
- Kayu tersebut bisa diekspor ke pulau Bali melalui pelabuhan

Atapupu atau diserahkan kepada para pedagang besar di kota Kupang yang kemudian dikirim ke pulau Bali.

- Pengiriman kayu cendana eks-RDTL dari pelabuhan Atapupu mauun kota Kupang itu dimaksudkan agar dianggap bahwa kayu cendana itu merupakan hasil produksi hutan atau perkebunan di pulau Timor bagian barat yang masih wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, penyelundupan uang palsu juga terjadi di mana uang yang dipalsukan umumnya adalah uang kertas lembaran bernilai Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-. Mekanisme distribusinya dapat digambarkan sebagaiberikut :

- Uang palsu rupiah dicetak di negara-negara tertentu, kemudian dibawa ke RDTL,
- Dari RDTL, uang palsu itu diselundupkan melalui kabupaten Belu dan kemudian disebarakan ke provinsi-provinsi di Indonesia, terutama ke pulau Jawa karena peredaran uang terbesar berada di pulau ini. Dengan masuknya uang palsu ke pulau Jawa, tentu secara proporsional uang palsu tidak terlalu mempengaruhi jumlah peredaran uang yang berada di pulau Jawa.

Matarantai Perdagangan

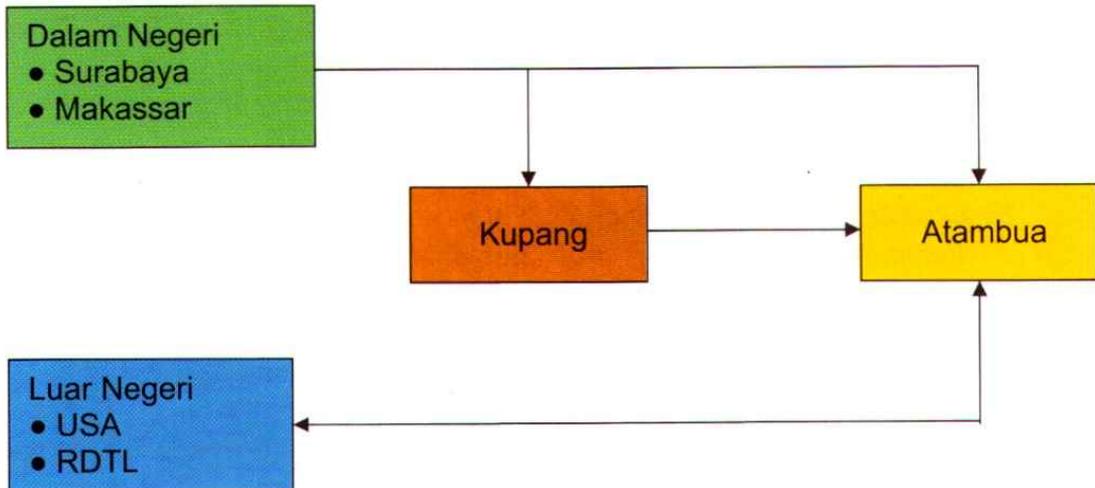
Secara umum, matarantai perdagangan di kabupaten Belu dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian besar, yakni ①perdagangan produk-produk hasil industri pengolahan atau *pabrikasi*, dan ② hasil-hasil pertanian. Hasil industri pengolahan umumnya berasal dari daerah lain yang masuk ke kabupaten Belu, sebaliknya produk hasil pertanian itu berasal dari kabupaten Belu didistribusi-kan ke daerah lain.

Barang-barang yang masuk ke kabupaten Belu pada dasarnya adalah barang-barang hasil dari sektor industri pengolahan seperti makanan dan minuman kaleng/kemasan, barang-barang elektronik, bahan-bahan bangunan (semen, paku, seng, paralon dan sejenisnya) maupun obat-obatan. Namun barang impor ada juga yang masuk ke kabupaten Belu seperti minyak jagung dan minyak dari sayur-mayur dari Amerika.

Matarantai perdagangan produk-produk pabrikasi pada dasarnya dapat digambarkan pada Bagan 1. di halaman berikut ini,

Pada umumnya produk-produk pabrikasi dalam bentuk makanan dan minuman dalam kaleng maupun kemasan lainnya itu berasal dari Surabaya, sementara yang berasal dari Makassar antara lain adalah bahan bangunan seperti semen, kayu maupun lainnya. Sementara produk-produk yang masuk kabupaten

Bagan 1
Mata Rantai Perdagangan Produk Pabrik ke Kabupaten Belu



Belu dari luar, khususnya dari RDTL umumnya adalah produk-produk yang bisa dikategorikan ilegal seperti kayu cendana, kopi, ternak, bahkan uang palsu yang dicetak di negara lain namun dimasukkan ke Indonesia melalui RDTL. Di lain pihak, tidak semua produk-produk yang diolah oleh industri didatangkan dari Surabaya, Makassar atau daerah-daerah lainnya hanya sampai ke kabupaten Belu saja, tetapi justru diteruskan oleh pengusaha ke RDTL karena berbagai seperti: tingkat keuntungan yang relatif lebih tinggi walaupun ada ketentuan dari pemerintah bahwa produk-produk olahan yang disubsidi oleh pemerintah tidak boleh diperdagangkan antar negara.

Produk-produk yang sering diselundupkan ke RDTL antara lain adalah bahan bakar minyak (bensin, solar dan

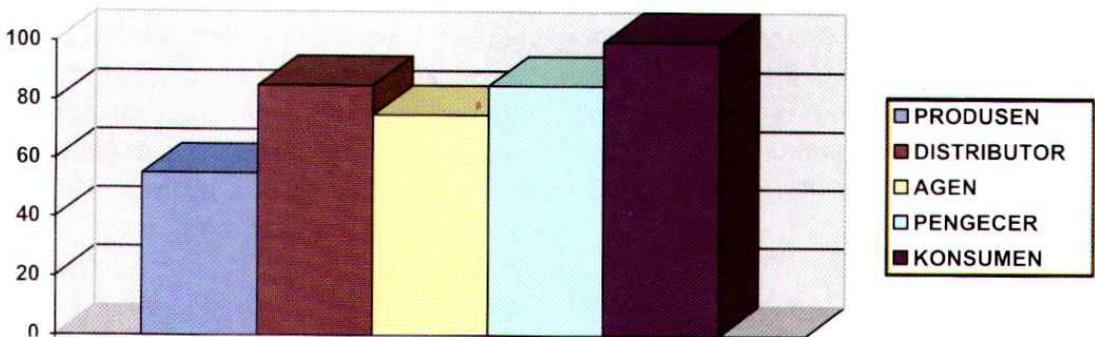
minyak tanah), beras dan bahan-bahan pokok lainnya. Pada umumnya keuntungan yang diraih oleh pengusaha yang melakukan penyelundupan produk-produk yang disubsidi cenderung lebih besar dibandingkan dengan produk-produk yang tidak disubsidi.

Secara proporsional, Bagan 2 dan Bagan 3 berikut akan menggambarkan *margin* yang diperoleh dari masing-masing pelaku ekonomi. Sebagai contoh adalah produk sembako pabrikan dan bahan bakar minyak (BBM)

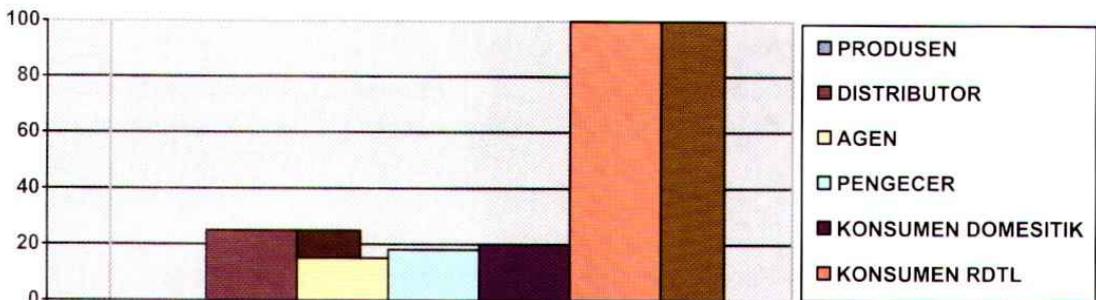
Matarantai Perdagangan Produk-produk Pertanian

Kegiatan niaga memang salah satu lapangan usaha yang diandalkan dalam struktur perekonomian kabupaten. Apalagi

Bagan 2.
Margin yang diperoleh Pelaku Ekonomi Produk SEMBAKO



Bagan 3
Margin yang Diperoleh Pelaku Ekonomi Produk BBM



ditambah peluang berjualan barang ke bekas provinsi ke-27 Indonesia itu yang lebih menguntungkan karena harganya relatif lebih mahal ketimbang di wilayah Indonesia. Negeri baru itu memang membutuhkan pasokan dari Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang bertindak sebagai pengumpul barang-barang dari petani semacam aneka rempah-rempah (kunyit), asem, kacang tanah, kemiri, madu, kacang hijau, jagung dan lainnya. Toko ini menerima barang tersebut dari petani dengan harga yang murah, akan tetapi

dibayar kontan. Selisih harga antara waktu membeli dari petani dan menjualnya lagi bisa 100% seperti madu yang dibeli dari petani seharga Rp 7.000/kg dijual ke pembeli Rp 13.000/kg tanpa mengubah apapun komoditas tersebut.

Selisih harga yang tajam dimungkinkan apabila pedagang masih harus melakukan kegiatan pasca panen seperti penjemuran, pengepakan, pensortiran dan sebagainya. Toko ini dalam memperoleh barang dari petani selain menerima barang langsung dari

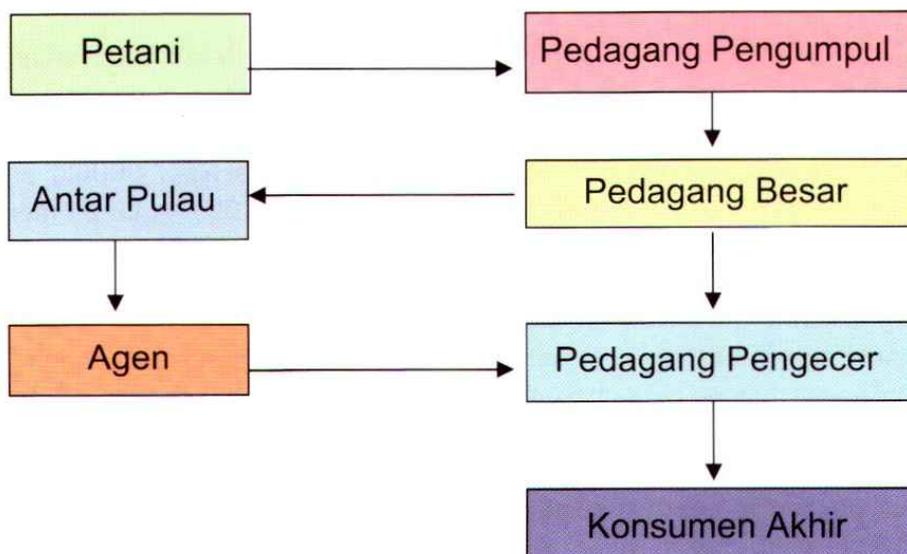
petani juga menggunakan tenaga-tenaga pengumpul di desa-desa penghasil yang diberi modal mereka diberi selisih harga sekitar 10 persen. Seperti madu, kalau seorang petani tidak menjual sendiri ke toko di Atambaua tetapi di desa penghasil, maka dia memperoleh harga jual hanya Rp 6000,- hingga Rp. 6.300 setiap kilogramnya.

Hasil produksi petani ini sifatnya musiman sehingga saat tidak mengirim barang toko ini mendatangkan barang dari daerah lain. Tiap pengiriman barang ada bea masuk yang dikenai 10% dari total nilai barang, dahulunya tidak ada hanya senilai US\$ 30 untuk ke timor leste, tidak berdasarkan persentase. Sekarang ini ditambah PPn 10%, bea cukai 5%, pph

22, sebesar 2,5%, asuransi 2,5%, pengapalan 10% sumbangan pihak ke tiga Rp 25/kg. Jadi total pungutan 20% dari total barang yang dikirim ditambah Rp 25/kg untuk pihak ke tiga. Pengusaha tersebut menerima barang apa saja yang dibawa petani berapapun jumlahnya, seperti akar alang-alang, kulit jambu. Dalam bertransaksi barang antar pulau yang membuka harga adalah pemilik barang di mana untuk petani di Atambaua relatif banyak pedagang besar (sekitar 6 pedagang) sehingga petani tinggal memilih mau menjual kemana, namun tidak semua toko mau membeli barang dagangan petani kalau jumlahnya sedikit.

Penyediaan prasarana dan sarana transportasi boleh dikatakan kurang.

Bagan 4
Mata Rantai Perdagangan Hasil Pertanian di Kabupaten Belu



Tabel 8 : Produk Unggulan Kabupaten Belu

| No | Sektor/Sub-sektor | Komoditas |
|----|--------------------------|--|
| 01 | Pertanian tanaman pangan | Kacang hijau, jagung |
| 02 | Perkebunan | Jambu mete |
| 03 | Perikanan dan kelautan | Cakalang, tongkol, cucut, kembung, baronang, karapu, kakap, ekor kuning, bawal, lobster, udang dan nener. Bandeng, tawes, nila, mujair, teripang |
| 04 | Peternakan | Sapi dan babi |
| 05 | Kehutanan | Jati, mahoni, kemiri, asam, cendana, dan madu |
| 06 | Perindustrian dan perdag | Gerabah, aneka kerajinan dari tali dan tenun ikat |
| 07 | Pertambangan | Marmer, minyak bumi, permata (intan), dan kapur |
| 08 | Pariwisata | Pantai dan teluk |

Sumber: Dinas pariwisata Kab Belu, 2004

Misalnya, Kecamatan Rinhat di bagian selatan yang sulit dijangkau dari Atambua. Diperlukan waktu empat hingga lima jam untuk mencapai kecamatan yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Atambua tersebut. Jeleknya jalan dan lamanya

waktu tempuh ini lebih banyak disebabkan oleh kondisi jalan yang jauh dari kategori baik. Angkutan umum yang menuju ke bagian selatan pun terbatas. Paling banyak dua rit setiap hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai kesimpulan jika dikaitkan dengan *Model Perberdayaan Masyarakat Perbatasan: Perdagangan Lintas Batas Belu-Timor Leste* adalah sebagai berikut:

1. Beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu lebih berat dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan RDTL. Hal ini disebabkan oleh:

- Beban administrasi dan keuangan semakin meningkat sehingga menjadi tidak proporsional lagi akibat penampungan penduduk dan pegawai negeri sipil eks provinsi Timor Timur,
- Adanya institusi pusat yang ikut terlibat dalam kepengurusan daerah perbatasan sehingga berpengaruh terhadap tata kerja Pemda Kabupaten Belu,
- Kesulitan ekonomi dan manajemen yang dihadapi akibat adanya tambahan sekitar 100.000 orang pengungsi eks provinsi Timor Timur sehingga berpengaruh terhadap aktivitas Pemda Kabupaten Belu dalam menampung mereka. Penciptaan lapangan kerja diperlukan agar tenaga kerja tersebut mampu terserap ke pasar kerja karena angka pengangguran

yang semakin tinggi akibat jumlah penganggur yang ada pun belum bisa terpecahkan. Kondisi ini akan mempersulit upaya mengurangi kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, kini dan mendatang,

2. Aktivitas perdagangan lintas batas ilegal relatif masih tinggi yang bisa dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan politik seperti berikut :

- *Secara budaya*, harga barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya yang meningkat atau laju inflasi yang tinggi di RDTL telah menjadikan menurunnya daya beli masyarakatnya (*decreasing purchasing power*). Namun solidaritas masyarakat kabupaten Belu dan sekitarnya masih kuat karena masih bersaudara (kelompok etnis Tetum, Kemak, Bunak dan Dawan Manlea banyak pula di Timor Leste) dengan memberikan bantuan kebutuhan hidup dengan cara mendistribusikannya melintasi batas negara ke saudaranya di wilayah RDTL,
- *Secara ekonomi*, perdagangan ilegal memberikan keuntungan yang besar bagi pemburu rente karena produk yang diselundupkan ke RDTL adalah produk subsidi seperti bahan bakar minyak dan sembilan bahan

pokok, namun harga di tingkat internasional mencapai beberapa kali lipat. Sementara produk ilegal yang diimpor adalah kayu cendana, uang palsu dan lainnya yang memberikan keuntungan tersendiri bagi para pemburu rente,

- Secara politis, perdagangan lintas batas antar negara yang terjadi selama ini lebih besar memberikan keuntungan sepihak, khususnya RDTL, sebaliknya yang terjadi adalah kerugian yang diderita oleh pemerintah Indonesia (NKRI).
3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada dasarnya masih dihadapkan pada kendala sebagai berikut :
- Program pemberdayaan masih belum terintegrasi antara yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat,
 - Institusi yang berwenang melakukan pemberdayaan guna mengkaitkan hubungan antara petani produsen dan pengusaha yaitu dengan mengajak instansi pemerintah (misalnya LIPI dan

BPPT) serta swasta di dalam peningkatan kemampuan masyarakat setempat,

- Badan usaha milik negara maupun daerah (BUMN/D) masih belum banyak membangun hubungan keterkaitan vertikal dengan berbagai usaha mikro dan kecil di kawasan perbatasan.

Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat maka pemberdayaan harus dilihat secara komprehensif, bahkan holistik, karena yang diberdayakan adalah masyarakat lokal di mana pemerintah pusat dan daerah harus terorganisir sebagai suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Di sini, pembedayaan diarahkan pada masyarakat lokal yang diawali dengan penyiapan pemerintah lokal untuk memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam mengelola sumberdaya daerah supaya tujuan pembangunan ekonomi bisa dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan (*sustainable economic growth*)⁴. Tujuan itu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menciptakan wirausaha baru dan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam perekonomian nasional maupun lokal di mana strategi pemberdayaan untuk tujuan ekonomi biasanya dirumus-

⁴ Lucky Sondakh (2003); Globalisasi dan Desentralisasi: Perspektif Ekonomi Lokal, hal 214-213 LP-FEUI, Jakarta

kan di tingkat nasional. Untuk daerah, efektivitas strategi pemberdayaan bisa dicapai dalam skala mikro yaitu :

- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bebas dari perangkap kemiskinan
- Meningkatkan produktivitas pelaku ekonomi sektor riil untuk dapat menghasilkan surplus dan melakukan transformasi sosial tradisional dari subsistem ke komersial modern.
- Meningkatkan *entrepreneurship*, kemampuan memanfaatkan surplus untuk diinvestasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif termasuk *human investment* guna meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membela hak-hak ekonomi, sosial dan politik

Dalam pengertian praktis, sasaran pemberdayaan adalah pemberdayaan petani ke petani profesional, penggunaan teknologi modern yang tepat guna, kemampuan memasarkan produk secara strategis, pemberdayaan nelayan ke arah nelayan modern dan lainnya. Jadi, keseluruhan individu masyarakat diberdayakan sehingga mereka lebih mampu

mengambil keputusan berdasarkan penalaran rasional, profesional, kiat manajemen produksi dan strategis dalam menjalankan usahanya, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ateng S (1996); *Perdagangan Lintas Batas Entekong* dalam Wiranta S (ed) 'Peranan Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', Pusat Penelitian Ekonomi dan Pembangunan-LIPI, Jakarta

Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur (2004); *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2003* (Kupang : BPS)

----- (2004);
Pendapatan Regional Nusa Tenggara Timur 2000-2003 (Kupang : BPS)

----- (2003);
Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 1993-2002 (Kupang : BPS)

Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Belu, 2005, *Kabupaten Belu Dalam Angka 2004* (Atambua : BPS dan Pemda Kabupaten Belu)

----- (2004);
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu 2003 (Atambua : BPS dan Pemda Kabupaten Belu)

Bank Indonesia (2002); *Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukuran di*

- Indonesia* (Jakarta : PPSK-BI)
- Haba, J, dan Siburian, R (2003); *Studi Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Timor Leste sebagai Pengembangan Standar Hidup* (Jakarta : PMB-LIPI)
- Lucky Sondakh (2003); *Globalisasi dan Desentralisasi: Perspektif Ekonomi Lokal*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
- Moleong, LJ (1997; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Pemda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu (2005); *Kabupaten Belu dalam Angka 2004* (Atambua : Pemda dan BPS Kabupaten Belu)
- Pemerintah Kabupaten Belu (2004); *Panduan Operasional Lima Pilar Pembangunan Kabupaten Belu* (Atambua : Pemda Kabupaten Belu)
- _____ (2004); *Profil Daerah Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2004* (Atambua : Pemda Kabupaen Belu)
- _____ (2004); *Rencana Strategis Kabupaten Belu 2004-2008* (Atambua : Pemda Kabupaten Belu)
- _____ (2003); *Rencana Penanganan Perbatasan RI (Belu) – Timor Leste Tahun 2003* (Atambua : Pemda Kabupaten Belu)
- Mubyarto, (2002); *Membangun Perekonomian Rakyat Nusa Tenggara Timur* (Kupang : kertas kerja)
- Riyadi dan D. S Bratakusumah (2003); *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Usman, S dkk (1999); *Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah*, Laporan IBRD yang presentasikan pada Lokakarya Nasional, Jakarta, Desember.